

TESIS

**EKSISTENSI PETUGAS REGISTRASI PADA PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI PEMERINTAHAN DESA**



Oleh :

JULIUS FRISHER MALORINGAN

NIM : 031414153059

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

SURABAYA

2016

**EKSISTENSI PETUGAS REGISTRASI PADA PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI PEMERINTAHAN DESA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Minat Studi Hukum Pemerintahan Pada Fakultas Hukum**

Universitas Airlangga

Oleh :

JULIUS FRISHER MALORINGAN

NIM : 031414153059

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

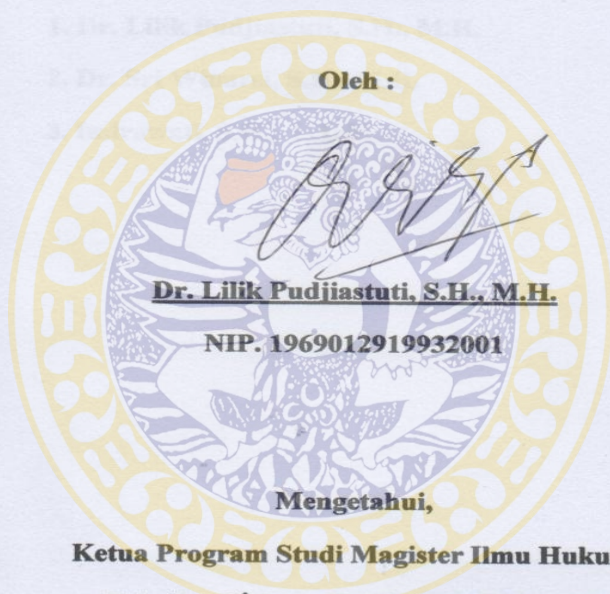
SURABAYA

2016

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 26 April 2016**

Oleh :



Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H.

NIP. 1969012919932001

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

NIP. 196504191990021001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada Tanggal 26 April 2016**

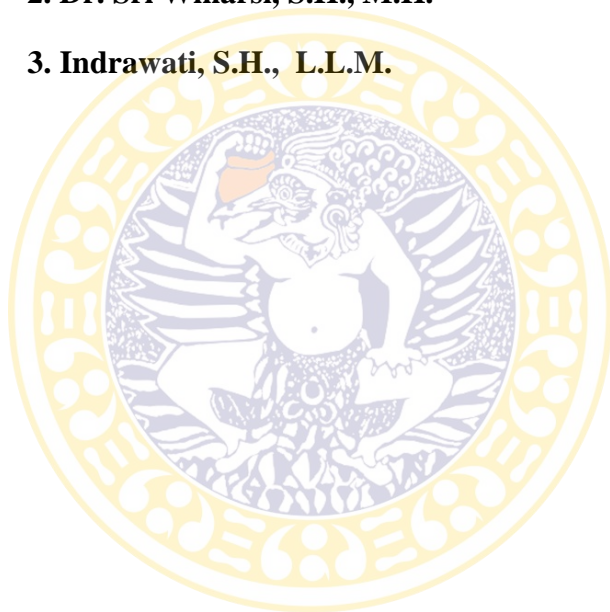
PANITIA PENGUJI TESIS:

Ketua : Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S.

Anggota : 1. Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H.

2. Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.

3. Indrawati, S.H., L.L.M.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan hanya kehadirat Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan segala hikmat dan kesehatan, kekuatan serta kesempatan kepada hambaNya untuk dapat merampungkan tesis ini.

Penulisan tesis ini dapat terselesaikan hanya karena kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Allah serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu ijinilah penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk melaksanakan tugas belajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Bapak Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran dekanat dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis beserta rekan-rekan selama melaksanakan tugas belajar;
4. Ibu Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dan dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis I yang telah dengan tekun dan sabra serta mau meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk memberikan arahan dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini;

5. Bapak Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S. selaku dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis II yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk memberikan arahan dan pengajaran dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini;
6. Ibu Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah menguji dan memberikan masukan sebagai perbaikan tesis ini;
7. Ibu Indrawati, S.H., L.L.M. , selaku dosen penguji yang telah menguji dan memberikan masukan yang berharga bagi perbaikan tesis ini;
8. Ibu Erni Agustin, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum atas bantuan, bimbingan, serta dukungannya kepada penulis beserta rekan-rekan selama melaksanakan tugas belajar;
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan pengajaran dari ilmu pengetahuannya serta memberikan bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
10. Bapak Narko, Bapak Tobi, Bapak Marsudi, dan Ibu Nani yang telah membantu dalam urusan dokumentasi dan informasi dalam penulisan tesis ini;
11. Sahabat-sahabat seperjuangan: Abdul Yasin, Ali Rahman, Arthur Indey, Diana, Dimas Rangga, Dominggus, Febie Saputra, Ferdinan Tambunan, Tommy Rumuarin, Kadri, Maulana Abdul, Nisha Tiana, Ridwan Saleh, dan Wilda;

12. Terakhir dan yang paling istimewa, Istriku Naomi Rora, putriku Josephine Amelia dan Carolina Heraldien, putraku Michael William atas dukungan doa dan cinta kasihnya yang tulus, semoga Tuhan Allah selalu memberikan berkat dan anugerahNya, serta membuat keluarga kita kuat dalam menghadapi sukda dan duka.

Tidak lupa diucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat dituliskan namanya satu per satu, atas segala bantuan, doa dan kerjasamanya dalam penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna dan oleh sebab itu, sangatlah diharapkan masukan dari para pembaca berupa kritik dan saran yang membangun agar bisa menjadi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis juga berharap semoga tesis ini memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Surabaya, Mei 2016

Julius Frisher Maloringan

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736)
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi.

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

Gedung B - Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya Telp. 031-5032243, 5023151 ext 141 Fax. 031-5020454
Website: <http://www.unair.ac.id>

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Hari, Tanggal : Jum'at, 29 April 2016
Ruang : 108 (Gedung B Fakultas Hukum)
Pukul : 08.00. WIB
Nama Mahasiswa : Julius Frisher Maliringan, S.H.
NIM : 031414153059
Judul : Eksistensi Petugas Registrasi pada Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Pemerintahan Desa.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Magister Ilmu Hukum ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 29 April 2016

Yang membuat pernyataan,



Julius Frisher
JULIUS FRISHER MALIRINGAN
NIM. 031414153059

ABSTRACT

Article 1 Paragraph (2) of 1945 Constitution states that sovereignty shall be in the hands of the people and implemented in accordance with the Constitution. This statement implies that people are the holders of sovereignty. Among the national objectives of Unitary State of Indonesia are protecting the entire Indonesian nation and native land, advancing general welfare, and developing intellectual life of the nation. As the acknowledgement of personal status and legal status of every Indonesian citizen, each local government is authorized to carry out population administration as regulated by the Constitution. In principle, Population Administration Service is the implementation of government obligation to provide security and recognition on the definitions of personal status and legal status during demographic events and important events experienced by Indonesian citizens both inside and outside Indonesia. In this sense, population administration refers to issuance of population documents that are important for every citizen. The documents serve as perfect and authentic evident that indicate personal identity of an individual, his/her relationship with family members that bring about legal consequences, including civil liability from parents towards their children, a husband to his wife, and inheritance rights. The State shall not de jure acknowledge the existence of an individual without legal population documents. Recently, the implementation of public services faces many conditions that are not conducive and in line with needs and changes on social life and national life, especially for people living in rural areas who are rightful for fair services without any discriminations. On the other hand, the management of population administration is also important for state administrators because demographic/population data are very important in planning and implementing development programs focus and oriented on targets. These provisions imply the importance of population administration management as part of good governance implementation.

ABSTRAKSI

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini berarti bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Untuk pengakuan status pribadi dan status hukum setiap Warga Negara Indonesia maka dalam pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang di atur oleh Undang-Undang. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang pada hakikatnya adalah pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada dalam dan/atau di luar wilayah NKRI. Administrasi kependudukan dalam hal ini penerbitan dokumen kependudukan sangat penting bagi penduduk, karena dapat menjadi bukti yang sempurna sebagai bukti autentik, yang menjadi bukti jati diri seseorang, hubungan seseorang dengan keluarganya yang memiliki rentetan akibat hukum baik tanggung jawab perdata orang tua pada anak, suami pada istri, maupun hak waris seseorang. Seseorang yang tidak memiliki dokumen kependudukan secara de jure keberadaannya dianggap tidak dianggap ada oleh Negara. Saat ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Terutama bagi Penduduk Desa, yang berhak mendapatkan pelayanan yang sama dan tidak diskriminatif. Disisi lain, penataan administrasi kependudukan juga penting bagi penyelenggara negara karena membutuhkan data kependudukan untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang terarah dan tepat sasaran. Ketentuan-ketentuan itu mengisyaratkan akan pentingnya penataan pengaturan administrasi kependudukan sebagai bagian dalam upaya mewujudkan *good governance*.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	viii
PERYATAN	
ABSTRAKSI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.5.1. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.....	9
1.5.2. Kewenangan Petugas Registrasi Dalam Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan Di Desa.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	14
1.6.1. Tipe Penelitian.....	14
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	14
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	15
1.6.4. Prosedure Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	16

1.6.5. Analisa.....	17
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika	17
BAB II : PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PENYELENGGARAAN DESA.....	19
2.1. Fungsi Pelayanan Administrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.....	20
2.1.1. Sejarah Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	21
2.1.2. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan.....	45
2.2. Tugas Pemerintah Desa Dalam Melakukan Pelayanan Administrasi Kependudukan.....	55
2.2.1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.....	63
2.2.2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.....	65
2.2.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi.....	68
BAB III : URGENSI PETUGAS REGISTRASI DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI PEMERINTAHAN DESA.....	71
3.1. Kedudukan Petugas Registrasi.....	72
3.2. Fungsi Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Desa	78

3.3.Penyelenggaraan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan Di
Desa Yang Diinginkan.....92

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....109

1. Kesimpulan.....109

2. Saran.....110

DAFTAR BACAAN

DAFTAR SINGKATAN

